

Kontrol Sosial dan Framing Media Lokal dalam Polemik Pembangunan Masjid MIAH di Bogor

Social Control and Local Media Framing in the Controversy over the Construction of the MIAH Mosque in Bogor

Suhaimi, Fauzan Kaifah & Cinta Rahmi

Abstract: *Mass media perform a crucial social control function by monitoring public affairs and shaping public understanding of contentious social issues. Existing studies on religious conflict reporting in Indonesia primarily focus on national media framing, while limited attention has been paid to how local media construct religious legitimacy and social control in intra-Muslim conflicts. This study examines the coverage of the construction of the Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) Mosque in Bogor by two local media outlets, Metropolitan.id and Hariansinarbogor.com, using a qualitative approach based on Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis at the levels of text, social cognition, and social context. The findings reveal that Metropolitan.id frames the controversy through narratives of social harmony and concerns over Salafi-Wahhabi influence, whereas Hariansinarbogor.com emphasizes constitutional rights, religious freedom, and the legality of mosque construction. These contrasting discourses demonstrate that local media do not merely disseminate information but actively construct competing narratives of religious legitimacy, reproduce symbolic power, and shape public perceptions of Islamic authority. This study contributes to the discourse on religious media framing by demonstrating that social control in local journalism operates through ideological discourse, making local media not only agents of public oversight but also producers of religious legitimacy and arenas for contesting Islamic authority in contemporary Indonesia.*

Keywords: Social Control; Critical Discourse Analysis; Religious Legitimacy; Local Media; Islamic Authority; Teun A. van Dijk



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0); <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Abstrak: *Media massa menjalankan fungsi kontrol sosial yang penting melalui pengawasan terhadap persoalan publik sekaligus membentuk pemahaman masyarakat mengenai isu-isu sosial yang diperdebatkan. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pemberitaan konflik keagamaan di Indonesia umumnya berfokus pada framing media nasional, sementara kajian tentang bagaimana media lokal mengonstruksi legitimasi keagamaan dan menjalankan fungsi kontrol sosial dalam konflik intra-Islam masih relatif terbatas. Penelitian ini menganalisis pemberitaan polemik pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) di Kota Bogor pada dua media lokal, Metropolitan.id dan Hariansinarbogor.com, menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk pada level struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metropolitan.id membingkai polemik melalui narasi harmoni sosial dan kekhawatiran terhadap berkembangnya ideologi Salafi-Wahabi, sedangkan Hariansinarbogor.com lebih menekankan hak konstitusional, kebebasan beragama, dan legalitas pembangunan masjid. Perbedaan konstruksi wacana tersebut menunjukkan bahwa media lokal tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga secara aktif memproduksi legitimasi keagamaan, mereproduksi kekuasaan simbolik, serta membentuk persepsi publik mengenai otoritas Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian framing media keagamaan dengan menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial dalam jurnalisme lokal bekerja melalui konstruksi ideologis, sehingga media lokal berperan tidak hanya sebagai pengawas publik, tetapi juga sebagai produsen legitimasi keagamaan dan arena kontestasi otoritas Islam di Indonesia kontemporer.*

Kata Kunci: Kontrol Sosial; Analisis Wacana Kritis; Legitimasi Keagamaan; Media Lokal; Otoritas Islam; Teun A. van Dijk.

Pendahuluan

Komunikasi merupakan sarana manusia untuk menyampaikan pesan dan perasaan, baik secara langsung melalui tatap muka maupun secara lisan. Perkembangan zaman membawa media massa sebagai alat komunikasi yang mampu menjangkau khalayak luas. Media massa meliputi berbagai bentuk seperti pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, dan media daring. Menurut Merton,¹ komunikasi massa memiliki dua aspek dasar, yakni fungsi nyata (*manifest function*) dan fungsi tersembunyi (*latent function*), di mana setiap fungsi sosial pada masyarakat dapat memberikan dampak fungsional maupun disfungsional. Fungsi komunikasi massa mencakup kontrol sosial, hiburan, transmisi budaya, dan korelasi.²

Sejalan dengan itu, Shoemaker dan Reese³ menekankan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mereproduksi kekuasaan dan ideologi yang dominan. Hal ini diperkuat oleh Hallin dan Mancini⁴ yang menjelaskan bagaimana sistem media sering berkelindan dengan politik. Bahkan, Happer dan Philo⁵ menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk kepercayaan publik dan mendorong perubahan sosial.

Salah satu fungsi penting komunikasi massa adalah kontrol sosial, yakni peran media dalam mengawasi, mengoreksi, dan mengkritik berbagai keputusan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Fungsi ini tercermin dalam pemberitaan mengenai pembangunan Masjid Imam Ahmad Hambali (MIAH) di Bogor, di mana media berperan sebagai pengawas publik terhadap proses dan keputusan yang terjadi. Pemberitaan terkait penolakan pembangunan masjid ini muncul pada 4 September 2024, dipicu oleh penolakan warga dan beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang mengkhawatirkan ajaran di masjid tersebut. Ketua LBH Ansor Kota Bogor, Rudyana, menilai ajaran yang diajarkan mengandung paham Wahabi-Salafi yang dianggap ekstrem.⁶

Masjid, sebagai rumah ibadah dan pusat kegiatan keagamaan umat Islam, memiliki posisi penting di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama per 7 Maret 2024, terdapat 299.692 masjid di Indonesia, dengan Masjid Jami sebagai tipe yang paling banyak dijumpai (242.520 unit).⁷ Semakin meningkatnya jumlah umat Islam mendorong kesadaran untuk membangun masjid, yang didorong oleh motivasi keagamaan, salah satunya hadis Nabi Muhammad SAW yang menjanjikan pahala besar bagi orang yang membangun masjid.⁸

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah, termasuk pembangunan rumah ibadah.⁹ Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan Masjid MIAH di Bogor mengalami penolakan karena perbedaan pandangan ajaran. MIAH yang berdiri sejak 2001 berada di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal, dan telah memiliki izin mendirikan bangunan sejak 2001 serta izin renovasi pada 2016. Meskipun demikian, pada 27 Juli 2022, Wali Kota Bogor mengeluarkan keputusan penghentian sementara renovasi dengan alasan konflik sosial.¹⁰

Dalam konteks ini, media berperan penting dalam membentuk opini publik. Menurut Rakhmat,¹¹ berita dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku pembaca melalui efek kognitif, afektif, dan konatif. Teun A. van Dijk¹² menekankan bahwa analisis wacana kritis mempelajari hubungan antara teks, kognisi, dan konteks sosial, di mana media berperan dalam membentuk representasi realitas yang dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Pendekatan ini memandang bahasa sebagai praktik sosial yang tidak netral, sehingga analisis terhadap pemberitaan dapat mengungkap ideologi dan kepentingan yang tersembunyi di balik teks. Pemikiran ini sejalan dengan Jørgensen dan Phillips¹³ serta Fairclough,¹⁴ yang menekankan bahwa wacana bukanlah netral, melainkan terikat oleh relasi kekuasaan dan ideologi.

Penelitian Yusuf Afandi¹⁵ berfokus pada kasus pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) dengan menelaah bagaimana media membingkai konflik tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap media memiliki kecenderungan *framing* yang berbeda dalam merepresentasikan polemik pembangunan MIAH, yang dipengaruhi oleh ideologi dan agenda masing-masing media. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis *framing* dalam pemberitaan media, sehingga belum menjelaskan secara mendalam bagaimana media lokal mengonstruksi fungsi kontrol sosial melalui praktik kewacanaan. Berangkat dari celah penelitian tersebut, artikel ini memandang media lokal tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai produsen kontrol sosial yang bersifat ideologis melalui konstruksi wacana. Dengan mengintegrasikan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk dan konsep kontrol sosial dalam komunikasi massa, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana jurnalisme media lokal membangun, mereproduksi, dan mempertarungkan legitimasi keagamaan dalam konflik internal umat Islam, khususnya pada polemik pembangunan Masjid MIAH di Kota Bogor.

Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memandang bahasa bukan sebagai medium netral, melainkan sarana yang sarat muatan kekuasaan. Paradigma ini berupaya mengungkap bagaimana wacana dibentuk, direproduksi, dan dipertahankan oleh struktur kekuasaan di masyarakat.¹⁶ Perspektif kritis menempatkan bahasa m instrumen ideologis yang mempengaruhi cara pandang publik. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk membongkar wacana dalam pemberitaan mengenai pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambali (MIAH) di dua media lokal, yaitu Metropolitan.id dan Hariansinarbogor.com.

Subjek penelitian meliputi wartawan dan pihak redaksi yang terlibat langsung dalam penulisan berita terkait MIAH. Objek penelitian adalah seluruh pemberitaan tentang pembangunan MIAH yang dimuat di kedua media tersebut. Lokasi penelitian berada di kantor Metropolitan.id di Jl. Raya Pajajaran, Bogor Utara, Kota Bogor, dan kantor Hariansinarbogor.com di Jl. Raya Cipinang Gading, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Penelitian dilaksanakan sejak Januari 2025, dengan fokus pada analisis teks yang telah dipublikasikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk menganalisis secara sistematis berita-berita yang dimuat kedua media terkait MIAH. Dalam penelitian kualitatif, observasi memungkinkan peneliti memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi teks.¹⁷ Wawancara dilakukan dengan wartawan dari masing-masing media untuk memperoleh perspektif internal terkait proses pemberitaan,

sesuai panduan wawancara mendalam dalam studi komunikasi.¹⁸ Dokumentasi meliputi arsip berita, foto, dan materi relevan lainnya yang mendukung analisis.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, di mana seluruh populasi berita mengenai MIAH yang terbit di kedua media dijadikan sampel penelitian. Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif ketika jumlah populasi relatif kecil dan peneliti ingin melakukan analisis secara menyeluruh.

Analisis data menggunakan model Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk yang mencakup tiga dimensi: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada dimensi teks, analisis dilakukan melalui struktur makro (makna global atau tema utama berita), superstruktur (alur atau skema berita), dan struktur mikro (unsur semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik). Dimensi kognisi sosial meliputi skema person, skema diri, skema peran, dan skema peristiwa yang mempengaruhi konstruksi berita oleh wartawan. Sedangkan dimensi konteks sosial memeriksa aspek akses dan kekuasaan, yakni bagaimana kelompok tertentu memiliki atau tidak memiliki akses dalam produksi dan distribusi wacana.

Analisis Berita Pertama Pembangunan Masjid MIAH di Metropolitan.id

Analisis pemberitaan pertama mengenai pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) di Metropolitan.id dengan judul: “Tolak Keras Pembangunan MIAH dan Keberadaan Wahabi di Kota Bogor, LBH Ansor: Pemkot Jangan Kabur Dari Masalah”.¹⁹

Pada struktur makro (tematik), tema utama berita ini terletak pada paragraf pertama yang memuat informasi mengenai polemik pembangunan MIAH di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Tema ini mengindikasikan adanya fungsi kontrol sosial media terhadap isu publik, di mana Metropolitan.id menempatkan pembangunan MIAH sebagai peristiwa yang perlu mendapat sorotan publik.

Pada superstruktur (skematik), berita disusun dalam pola yang konsisten dengan model piramida terbalik. Judul berita mengutip pernyataan Ketua LBH Ansor yang menolak keras pembangunan MIAH sekaligus mengkritik keberadaan kelompok Wahabi di Kota Bogor. Lead berita memperkuat posisi ini dengan menjelaskan lokasi dan fakta bahwa polemik kembali mencuat. Isi berita (*story*) menempatkan pendapat Ketua LBH Ansor di awal paragraf, menunjukkan prioritas media dalam menampilkan sikap penolakan tersebut. Penutup berita berisi pendapat pihak yayasan MIAH yang menginginkan pembangunan tetap dilanjutkan, ditempatkan pada bagian akhir yang secara implisit memperlihatkan bahwa perspektif tersebut tidak menjadi fokus utama pemberitaan.

Pada struktur mikro, level semantik memperlihatkan latar, detail, maksud, dan pra-anggapan yang cenderung memosisikan pembangunan MIAH sebagai isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Latar pemberitaan menekankan kemarahan Ketua LBH Ansor terhadap Pemkot Bogor yang dinilai lalai mengantisipasi berkembangnya paham Salafi-Wahabi. Detail berita memperkuat narasi ini dengan menggambarkan paham tersebut sebagai sumber kekacauan di berbagai belahan dunia. Maksud yang tersirat adalah memberikan peringatan kepada Pemkot Bogor untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perizinan. Pra-anggapan yang muncul mengaitkan Salafi-Wahabi sebagai penyebab utama potensi kericuhan.

Pada aspek sintaksis, ditemukan penggunaan kalimat aktif dan pasif yang membentuk struktur narasi, serta pemanfaatan kata sambung seperti “dan” dan “sehingga” untuk menghubungkan argumen. Penggunaan kata ganti “ia” merujuk pada Ketua LBH Ansor, menjaga kontinuitas narasi.

Dari segi stilistik, pemilihan diksi seperti “kekacau-balauan”, “terstruktur dan sistematis”, serta “kezaliman” menunjukkan ideologi dan sikap media yang selaras dengan narasumber yang menolak pembangunan MIAH.

Dalam elemen retorik, pemberitaan memanfaatkan foto Ketua LBH Ansor sebagai ilustrasi visual, metafora seperti “cuci tangan” untuk menggambarkan sikap Pemkot Bogor, serta ekspresi tegas yang mengajak masyarakat mengejar pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Bila dikaji dari perspektif fungsi dan disfungsi komunikasi massa, pemberitaan ini memuat beberapa fungsi penting. *Pertama*, fungsi kontrol sosial terlihat dari kritik terhadap Pemkot Bogor yang dinilai lalai dalam mengawasi perizinan, disertai disfungsi berupa potensi stigmatisasi terhadap kelompok tertentu. *Kedua*, fungsi transmisi budaya tampak pada narasi yang menolak paham Salafi-Wahabi karena dianggap bertentangan dengan pemahaman Islam di Indonesia; disfungsi yang mungkin timbul adalah polarisasi antarkelompok masyarakat. *Ketiga*, fungsi korelasi hadir dalam bentuk ajakan kolektif untuk menolak pembangunan MIAH, namun disfungsi korelasi dapat memicu aksi protes atau penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah. *Keempat*, fungsi hiburan tidak ditemukan karena berita disajikan dalam format *straight news* yang berfokus pada fakta aktual dengan struktur piramida terbalik.

Dengan demikian, pemberitaan pertama Metropolitan.id memperlihatkan kecenderungan *framing* yang memihak narasi penolakan terhadap pembangunan MIAH, baik melalui pemilihan narasumber utama, penempatan informasi, maupun strategi kebahasaan yang digunakan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Dijk bahwa struktur wacana dapat menjadi sarana reproduksi ideologi dalam media massa.

Analisis Berita Kedua Pembangunan Masjid MIAH di Metropolitan.id

Analisis pemberitaan kedua di Metropolitan.id berjudul “Balada Konflik MIAH yang Tak Kunjung Usai”²⁰ menunjukkan bagaimana media mengonstruksi informasi terkait polemik pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) di Kota Bogor. Berdasarkan model analisis wacana kritis Teun A. van Dijk, pemberitaan ini dapat ditinjau dari tiga struktur utama, yakni struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.

Secara struktur makro (tematik), tema utama yang diangkat adalah stagnasi pembangunan MIAH yang tidak kunjung terealisasi. Metropolitan.id menyajikan kronologi permasalahan, mulai dari keputusan Pemerintah Kota Bogor menghentikan pembangunan, hingga penjelasan dari pihak-pihak terkait, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pengurus MIAH.

Dari sisi superstruktur (skematik), berita dibuka dengan judul yang menekankan aspek konflik (Balada Konflik MIAH yang Tak Kunjung Usai) dan *lead* yang menempatkan isu ini sebagai permasalahan yang kembali mengemuka. Isi berita memuat narasi kronologis yang menampilkan dua sudut pandang: FKUB yang tidak dilibatkan dalam tim penanganan konflik sosial namun berinisiatif mengambil peran mediasi, dan pengurus MIAH yang menegaskan keberadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sah sejak 2001. Penutup berita menggunakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan larangan pelarangan pembangunan rumah ibadah, mengarahkan pembaca pada wacana kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

Pada struktur mikro, aspek semantik memperlihatkan latar yang menonjolkan perbedaan pandangan antara Pemkot Bogor, FKUB, dan pihak MIAH. Detail berita mengungkapkan langkah Pemkot Bogor yang didasarkan pada potensi konflik sosial, sedangkan pihak MIAH mengklaim adanya tekanan politik yang mendorong pembekuan IMB. Maksud berita mencerminkan dua perspektif: legalitas penetapan konflik sosial menurut UU No. 7 Tahun 2012 dan dampak penghentian proyek yang membuat bangunan terbengkalai. Praanggapan dari pihak Pemkot adalah adanya upaya mediasi, sementara pihak MIAH menilai tidak ada ajakan dialog selama 90 hari masa penetapan konflik.

Analisis sintaksis menunjukkan penggunaan kalimat aktif dan pasif yang seimbang, dengan koherensi dibangun melalui konjungsi seperti *dan*, *sehingga*, *sebab*, dan *bahkan*. Kata ganti “*ia*” digunakan untuk merujuk pada individu atau lembaga. Secara stilistik, wartawan memilih diksi yang cenderung netral namun tetap memuat kritik implisit, seperti pada kutipan yang mengaitkan konflik dengan perbedaan aliran keagamaan. Aspek retorik hadir melalui penggunaan foto masjid yang disegel dan terbengkalai, metafora “DNA” untuk karakter toleran masyarakat

Bogor, serta deskripsi ekspresif tentang jamaah yang harus berpencar mencari tempat ibadah.

Dari perspektif fungsi komunikasi massa, pemberitaan ini memuat fungsi kontrol sosial dengan menampilkan pandangan beragam pihak, namun disfungsi muncul karena kurangnya ruang dialog yang dapat membingungkan publik. Fungsi transmisi budaya terlihat pada peringatan bahwa penolakan pembangunan masjid adalah pidana kecuali dinyatakan sesat oleh pengadilan, dengan disfungsi berupa potensi eksklusivitas pemahaman keagamaan. Fungsi korelasi terlihat pada penjelasan dampak penghentian pembangunan terhadap aktivitas jamaah, sedangkan disfungsi korelasi memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Fungsi hiburan tidak ditemukan, mengingat berita berbentuk *straight news* yang bersifat aktual dan faktual.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Metropolitan.id mengonstruksi berita dengan menekankan kronologi konflik dan keberagaman perspektif, namun narasi yang disajikan masih membuka ruang bagi pembentukan opini publik yang berbeda-beda, sesuai dengan afiliasi atau latar belakang pembaca.

Kognisi Sosial Media Metropolitan.id

1) Skema Person

Pada pemberitaan pertama, wartawan membangun skema person dengan memusatkan narasi pada pendapat LBH Ansor yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH). Tidak hanya menyajikan pernyataan penolakan, wartawan juga mengulas pandangan terkait pemahaman salafi-wahabi yang dinilai dapat memecah belah umat. Sementara itu, pada pemberitaan kedua, skema person dibentuk melalui penyajian kronologi awal terjadinya polemik pembangunan MIAH, yang berfungsi untuk memberi pemahaman menyeluruh mengenai akar masalah.

2) Skema Diri

Dalam pemberitaan pertama, media membangun identitas dirinya sebagai pihak yang cenderung berpihak pada penolakan pembangunan MIAH. Hal ini tampak dari pemilihan narasumber utama yang berasal dari LBH Ansor. Pada pemberitaan kedua, media memosisikan diri sebagai penengah dengan menguraikan secara rinci latar belakang dan dinamika polemik pembangunan MIAH, sehingga terkesan memberikan ruang bagi semua pihak.

3) Skema Peran

Pada pemberitaan pertama, peran Pemerintah Kota Bogor ditampilkan sebagai pihak yang tidak memiliki sikap tegas dalam menyikapi pembangunan MIAH. Sebaliknya, pemberitaan kedua menempatkan Pemkot sebagai pihak

yang secara aktif menghentikan pembangunan MIAH, sekaligus menyoroti sikap FKUB yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

4) Skema Peristiwa

Pemberitaan pertama merepresentasikan peristiwa dengan menonjolkan pernyataan LBH Ansor bahwa ajaran salafi-wahabi dapat memecah belah umat, sehingga dijadikan dasar penolakan terhadap pembangunan MIAH. Pada pemberitaan kedua, skema peristiwa dibentuk melalui penjelasan kronologis polemik pembangunan MIAH yang melibatkan berbagai narasumber, mulai dari pihak yayasan MIAH, FKUB, hingga Pemkot Bogor.

Konteks Sosial – Media Metropolitan.id

1) Kekuasaan

Dalam wawancara dengan redaksi Metropolitan.id, tidak ditemukan indikasi adanya pihak yang memengaruhi wartawan dalam menyusun pemberitaan mengenai MIAH. Wacana berita tidak memperlihatkan dominasi satu kelompok tertentu dalam memengaruhi isi pemberitaan.

2) Akses

Pengakuan pihak redaksi Metropolitan.id, Peliputan tidak menunjukkan keterbatasan akses informasi akibat kendali kelompok berkuasa. Semua pihak yang terlibat dalam polemik MIAH dilibatkan dalam pemberitaan, sehingga informasi yang disajikan mencerminkan perspektif yang beragam dan relatif seimbang.

Analisis Berita Pertama Pembangunan Masjid MIAH di Hariansinarbogor.com

Pemberitaan pertama di Hariansinarbogor.com berjudul “Aktivis Bogor Soroti Surat Ketua MUI Soal MIAH”²¹ mengangkat isu pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) di Kota Bogor yang sebelumnya sempat dihentikan oleh Pemerintah Kota Bogor pada 2022. Berita ini memfokuskan narasi pada kritik terhadap surat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor yang dinilai turut mendukung penghentian pembangunan. Berdasarkan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk, berita tersebut dapat dipetakan melalui tiga struktur utama: struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.

Secara struktur makro (tematik), tema yang diangkat adalah pembelaan terhadap kelanjutan pembangunan MIAH. Narasi dibangun dengan menampilkan pandangan Aktivis Bogor Raya, Ahmad Rohani, yang menilai bahwa penolakan pembangunan masjid bertentangan dengan konstitusi. Isu ini juga dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang membatalkan pembekuan pembangunan MIAH, namun belum dijalankan oleh Pemkot Bogor.

Pada superstruktur (skematik), judul berita secara eksplisit menyasar isu surat MUI, sementara *lead* menekankan dukungan publik terhadap pembangunan MIAH. Isi berita memuat beberapa poin utama: pernyataan Rohani bahwa masa penetapan konflik sosial telah melebihi 90 hari sehingga tidak lagi relevan dijadikan dasar penghentian pembangunan; pandangan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Hasbulloh, yang menegaskan pentingnya menjamin hak beribadah dan menjaga kohesi sosial; serta penjelasan hukum terkait putusan pengadilan yang memenangkan pihak yayasan MIAH mulai dari tingkat PTUN hingga Mahkamah Agung. Penutup berita memuat pernyataan pengurus MIAH yang menegaskan bahwa sejak berdirinya pada 2001, masjid tersebut tidak pernah mendapat penolakan masyarakat.

Dari sisi struktur mikro, aspek semantik memperlihatkan latar yang menggambarkan ketegangan antara keputusan hukum dan sikap Ketua MUI Kota Bogor. Narasumber menilai surat penolakan dari MUI tidak memiliki dasar hukum karena bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Detail berita menjelaskan tujuan renovasi MIAH agar lebih nyaman digunakan, serta legalitas perizinan yang telah dikantongi. Maksud utama yang muncul adalah agar pembangunan dilanjutkan berdasarkan alasan hukum dan hak konstitusional warga untuk beribadah. Praanggapan yang dibangun adalah bahwa selama MIAH berdiri, masjid ini selalu terbuka dan berfungsi tanpa konflik.

Analisis sintaksis menunjukkan penggunaan kalimat aktif dan pasif secara bergantian, dengan kata penghubung seperti *dan*, *selain itu*, *tetapi*, *namun*, dan *hingga* untuk menjaga koherensi. Kata ganti “*ia*” digunakan untuk merujuk kepada narasumber individu, sedangkan “*kami*” dipakai untuk mewakili organisasi seperti FKUB. Pada aspek stilistik, berita memanfaatkan diksi seperti “*kerukunan*” dan “*roadmap*” untuk menegaskan urgensi perencanaan strategis pemerintah dalam menyelesaikan polemik.

Elemen retorik hadir melalui penggunaan metafora “*pembekuan*” yang merujuk pada penghentian pembangunan MIAH. Foto yang ditampilkan di cover berita memperlihatkan Ahmad Rohani sebagai aktivis yang mendukung kelanjutan pembangunan, sehingga menguatkan kesan keberpihakan media terhadap narasi pro-pembangunan.

Dari perspektif fungsi komunikasi massa, berita ini memuat fungsi kontrol sosial dengan menyoroti sikap kritis terhadap kebijakan penghentian pembangunan rumah ibadah, namun disfungsi kontrol sosial dapat memunculkan persepsi bahwa membangun rumah ibadah berisiko tinggi mendapatkan hambatan administratif. Fungsi transmisi budaya muncul dalam pesan untuk menjaga inklusivitas kehidupan beragama, sementara disfungsi berpotensi memunculkan rasa ingin tahu atau bias terhadap kelompok keagamaan tertentu. Fungsi korelasi terlihat dalam penyampaian

berbagai pendapat—aktivis, pengurus MIAH, FKUB, dan pemerintah—yang bertujuan meredakan ketegangan, tetapi disfungsi korelasi dapat memicu gesekan antar kelompok jika polemik berlarut-larut. Fungsi hiburan tidak ditemukan karena berita dikemas dalam bentuk *straight news* yang menekankan fakta aktual.

Temuan ini memperlihatkan bahwa Hariansinarbogor.com membentuk wacana yang condong kepada pihak pro-pembangunan MIAH, memanfaatkan sumber dari aktivis dan pengurus masjid untuk menguatkan legitimasi hukum, serta menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang perlu segera menjalankan putusan pengadilan.

Analisis Berita Kedua Pembangunan Masjid MIAH di Hariansinarbogor.com

Berita kedua di Hariansinarbogor.com berjudul “Soal Pembangunan Masjid, GMPRI Minta Hak Beribadah di Tempat Ibadah Terpenuhi”²² mengangkat respons organisasi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) terhadap surat penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor. Analisis menggunakan kerangka wacana kritis Teun A. van Dijk menunjukkan bahwa konstruksi berita ini diarahkan untuk menegaskan pentingnya hak beribadah yang dijamin konstitusi, sekaligus mengkritisi sikap MUI yang dianggap bertentangan dengan putusan hukum.

Dari sisi struktur makro (tematik), berita mengusung tema pro-pembangunan MIAH dengan menekankan bahwa penolakan yang muncul lebih disebabkan oleh perbedaan pemahaman dalam menjalankan syariat, bukan keberadaan bangunan masjid itu sendiri. GMPRI, melalui Ketua Bidang Informasi DPP, Suferi, menjadi narasumber utama yang menyampaikan pandangan ini.

Pada superstruktur (skematik), judul berita secara eksplisit menyuarakan tuntutan agar hak beribadah di tempat ibadah terpenuhi. *Lead* berita memaparkan bahwa surat MUI Kota Bogor yang menolak pembangunan MIAH dan meminta agar putusan PTUN Bandung tidak dijalankan telah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Isi berita memuat kritik Suferi terhadap kapasitas MUI dalam mengeluarkan surat penolakan, serta penegasan bahwa harus ada pemisahan antara perbedaan pemahaman keagamaan dengan pembangunan tempat ibadah. Penutup berita memuat alasan-alasan resmi dari MUI dalam menolak pembangunan MIAH, di antaranya gagalnya mediasi, adanya penolakan ormas, keberadaan tempat ibadah lain di sekitar lokasi, dan status konflik sosial yang pernah ditetapkan Pemkot Bogor.

Analisis struktur mikro memperlihatkan bahwa secara semantik, latar berita bertumpu pada pertanyaan hukum terkait kapasitas MUI dalam membatalkan atau menolak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. GMPRI menilai tindakan MUI berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan bertentangan

dengan perlindungan konstitusional atas hak beribadah. Elemen detail menjelaskan kronologi penerbitan surat penolakan MUI, serta pendapat GMPRI mengenai perlunya pemisahan antara perbedaan pemahaman agama dan pendirian tempat ibadah. Maksud berita jelas: menyerukan peran pemerintah, MUI, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang menjaga kondusivitas sosial tanpa menghilangkan hak beribadah warga. Praanggapan yang muncul adalah kekhawatiran bahwa penolakan berbasis perbedaan pemahaman dapat berkembang menjadi penolakan fisik terhadap pembangunan rumah ibadah.

Dalam aspek sintaksis, berita menggunakan variasi kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif umumnya digunakan untuk menegaskan pandangan GMPRI, sementara kalimat pasif muncul dalam penyebutan surat penolakan MUI. Koherensi dibangun melalui penghubung seperti disisi lain, secara hukum, dan apabila. Kata ganti “ia” digunakan untuk merujuk pada Suferi, sedangkan “kita” digunakan untuk mewakili GMPRI sebagai organisasi. Secara stilistik, wartawan memilih diksi “reaksi tajam” dan “salah kaprah” yang bernuansa kritik tegas terhadap MUI. Elemen retorik muncul melalui penggunaan foto masjid MIAH dengan pintu terkunci dan bendera merah putih, yang secara visual menegaskan simbol hak beribadah dan nasionalisme, meski akses fisik tertutup.

Berdasarkan kerangka fungsi komunikasi massa, berita ini memuat fungsi kontrol sosial dengan mempublikasikan kritik GMPRI terhadap MUI. Disfungsi kontrol sosial berpotensi memunculkan kecurigaan publik bahwa MUI tidak netral dalam kasus ini. Fungsi transmisi budaya hadir dalam ajakan memisahkan perbedaan pemahaman agama dari hak beribadah, sementara disfungsi dapat memicu keingintahuan publik terhadap isu aliran keagamaan tertentu seperti salafi-wahabi. Fungsi korelasi tercermin dari upaya menyampaikan pandangan bahwa setiap kelompok harus saling menghormati dalam tata cara beribadah, namun disfungsi korelasi berisiko menimbulkan gesekan antar kelompok jika perbedaan tidak dikelola dengan baik. Fungsi hiburan tidak ditemukan karena berita disajikan dalam format *straight news* yang mengutamakan kecepatan dan kelengkapan informasi faktual.

Secara keseluruhan, wacana dalam berita ini menunjukkan bahwa Hariansinarbogor.com memosisikan GMPRI sebagai aktor kunci dalam membela hak beribadah dan mendukung kelanjutan pembangunan MIAH, sambil mempertanyakan legitimasi tindakan MUI yang menolak putusan hukum

Kognisi Sosial – Media Hariansinarbogor.com

1) Skema Person

Dalam kedua berita yang dianalisis, wartawan memandang bahwa penghentian pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH)

bertentangan dengan konstitusi. Posisi ini diiringi kritik tegas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor yang turut menolak pembangunan. Kritik tersebut diarahkan pada sikap MUI yang dinilai melampaui kapasitasnya, khususnya ketika menentang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2) Skema Diri

Hariansinarbogor.com membangun identitas dirinya sebagai media yang mendukung kelanjutan pembangunan MIAH. Sikap ini diperkuat dengan penjelasan bahwa selama berdirinya, MIAH tidak pernah memunculkan konflik dengan masyarakat, serta telah mengantongi izin resmi pembangunan dan renovasi.

3) Skema Peran

Wartawan memosisikan diri sebagai pihak yang memberi rekomendasi penyelesaian, dengan menyarankan MUI dan Pemerintah Kota Bogor untuk duduk bersama mencari solusi damai terkait permasalahan MIAH. Peran ini menempatkan media tidak sekadar sebagai pengamat, tetapi juga sebagai fasilitator ide untuk menjaga stabilitas sosial.

4) Skema Peristiwa

Peristiwa yang dikonstruksi dalam teks berita menggambarkan bahwa penolakan pembangunan MIAH atas dasar perbedaan pemahaman agama bukanlah alasan yang dapat diterima. Wartawan mendorong Pemkot Bogor dan MUI agar menjaga kerukunan umat beragama, serta menghindari tindakan yang dapat memperlebar perpecahan di masyarakat.

Konteks Sosial – Media Hariansinarbogor.com

1) Kekuasaan

Dalam pemberitaan Hariansinarbogor.com, tidak ditemukan indikasi keterlibatan individu atau kelompok yang memengaruhi secara langsung arah pemberitaan MIAH. Konstruksi berita tampak dibangun berdasarkan pandangan dan fakta yang diperoleh wartawan dari berbagai narasumber.

2) Akses

Media memberikan kesempatan yang relatif setara kepada semua pihak yang terlibat dalam polemik MIAH untuk menyampaikan pandangan mereka. Meski *framing* berita cenderung mendukung pembangunan, ruang bagi pihak-pihak yang memiliki posisi berbeda tetap disediakan dalam teks pemberitaan.

Media sebagai Produsen Legitimasi Keagamaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemberitaan Metropolitan.id dan Hariansinarbogor.com tidak hanya terletak pada cara membingkai (*framing*)

konflik pembangunan Masjid MIAH, tetapi juga pada cara kedua media membangun legitimasi keagamaan melalui strategi diskursif. Dalam perspektif *Critical Discourse Analysis* (CDA), media bukan sekadar saluran informasi yang merefleksikan realitas, melainkan institusi sosial yang secara aktif memproduksi, mereproduksi, dan mendistribusikan makna sesuai dengan orientasi ideologis tertentu. Oleh karena itu, setiap pilihan narasumber, struktur berita, penggunaan istilah, maupun penonjolan fakta tertentu merupakan bagian dari proses pembentukan legitimasi sosial terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks ini, media berfungsi sebagai *producer of religious legitimacy*, yaitu aktor yang ikut menentukan siapa yang dipandang memiliki otoritas keagamaan yang sah di ruang publik.²³

Metropolitan.id cenderung membangun legitimasi melalui narasi yang mengaitkan penolakan pembangunan Masjid MIAH dengan upaya menjaga harmoni sosial dan mencegah berkembangnya paham yang dipersepsikan berpotensi memecah belah umat. Penempatan pernyataan Ketua LBH Ansor pada bagian awal berita, disertai penggunaan istilah seperti Salafi-Wahabi, kekacau-balauan, dan kezaliman, membentuk representasi bahwa pembangunan masjid bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berkaitan dengan ancaman terhadap kohesi sosial-keagamaan masyarakat. Sebaliknya, Hariansinarbogor.com membangun legitimasi melalui narasi legalitas, hak konstitusional warga negara, serta penghormatan terhadap putusan pengadilan. Dengan lebih banyak mengutip pengurus MIAH, FKUB, dan organisasi pendukung pembangunan masjid, media ini mengonstruksi legitimasi berdasarkan prinsip kebebasan beragama dan supremasi hukum. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kedua media mengembangkan konstruksi legitimasi yang berbeda sesuai dengan orientasi wacana masing-masing.

Fenomena ini sejalan dengan teori representasi Stuart Hall yang menyatakan bahwa media tidak pernah sekadar mencerminkan realitas, melainkan secara aktif membangun realitas melalui proses seleksi, klasifikasi, dan representasi terhadap suatu peristiwa. Representasi bukanlah proses yang netral, tetapi selalu dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan kepentingan institusi media. Dengan demikian, penggunaan label seperti Salafi-Wahabi, Islam moderat, hak beribadah, maupun kerukunan bukan sekadar pilihan bahasa, melainkan strategi representasional yang mengarahkan pembaca pada pemaknaan tertentu terhadap konflik pembangunan Masjid MIAH.²⁴ Dalam kerangka ini, bahasa media menjadi instrumen yang membentuk batas antara kelompok yang dipersepsikan memperoleh legitimasi moral dan kelompok yang diposisikan sebagai pihak yang dipersoalkan.

Lebih jauh lagi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan yang diproduksi media tidak hanya berkaitan dengan benar atau salahnya suatu kelompok, tetapi juga menyangkut proses pembentukan otoritas Islam di ruang

publik. Hal ini memperkuat pandangan Pierre Bourdieu bahwa legitimasi merupakan bentuk modal simbolik (*symbolic capital*) yang diperebutkan oleh berbagai aktor sosial untuk memperoleh pengakuan publik. Dalam konteks konflik pembangunan Masjid MIAH, pemberitaan media menjadi salah satu arena distribusi modal simbolik tersebut, karena media memiliki kemampuan untuk memberikan visibilitas, kredibilitas, sekaligus otoritas kepada aktor-aktor tertentu melalui konstruksi wacana yang dibangunnya.²⁵

Analisis ini juga memperlihatkan bahwa fungsi kontrol sosial media tidak pernah sepenuhnya bebas dari kepentingan ideologis. Kritik terhadap pemerintah, pembelaan terhadap hak konstitusional, maupun penolakan terhadap kelompok tertentu selalu dikonstruksi melalui proses seleksi dan penonjolan informasi yang mencerminkan orientasi nilai media. Dengan demikian, media lokal dalam kasus pembangunan Masjid MIAH tidak hanya menjalankan fungsi informatif, tetapi juga berperan sebagai aktor ideologis yang membentuk legitimasi keagamaan, mendefinisikan batas-batas otoritas Islam publik, serta memengaruhi cara masyarakat memahami konflik intra-Muslim. Temuan ini menguatkan argumentasi Norman Fairclough bahwa wacana merupakan praktik sosial yang selalu berkaitan dengan relasi kuasa dan produksi ideologi, sehingga media menjadi salah satu arena utama dalam proses reproduksi kekuasaan simbolik di masyarakat.²⁶

Kontestasi Otoritas Islam Publik dalam Pemberitaan Pembangunan Masjid MIAH

Konflik pembangunan Masjid MIAH tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif mengenai izin pendirian rumah ibadah ataupun sebagai konflik lokal antara kelompok masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa polemik tersebut merupakan bagian dari kontestasi yang lebih luas mengenai otoritas keagamaan dalam Islam Indonesia. Masjid, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang produksi pengetahuan, pembentukan identitas keagamaan, dan distribusi legitimasi sosial. Oleh karena itu, pemberitaan media mengenai pembangunan Masjid MIAH sesungguhnya merepresentasikan perebutan kewenangan untuk mendefinisikan bentuk Islam yang dianggap sah dan layak memperoleh pengakuan di ruang publik.²⁷

Dalam perspektif sosiologi agama, otoritas keagamaan selalu bersifat dinamis karena dibentuk melalui proses negosiasi antara institusi keagamaan, negara, media, dan masyarakat. Dale F. Eickelman dan Armando Salvatore menjelaskan bahwa pada masyarakat Muslim kontemporer, otoritas agama tidak lagi dimonopoli oleh ulama tradisional, tetapi diproduksi melalui berbagai ruang publik, termasuk media massa dan media digital. Dengan demikian, media berfungsi sebagai arena yang memungkinkan berbagai aktor keagamaan bersaing untuk memperoleh pengakuan, legitimasi, dan pengaruh dalam mendefinisikan Islam di ruang publik.²⁸

Dalam kasus Masjid MIAH, Metropolitan.id dan Hariansinarbogor.com memperlihatkan strategi legitimasi yang berbeda terhadap aktor-aktor yang terlibat. Metropolitan.id lebih banyak memberikan ruang kepada pemerintah daerah, MUI, GP Ansor, serta tokoh masyarakat yang menilai pembangunan Masjid MIAH perlu mempertimbangkan stabilitas sosial dan potensi konflik ideologis. Sebaliknya, Hariansinarbogor.com lebih menonjolkan suara pengurus MIAH, kuasa hukum, dan pihak-pihak yang menekankan pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara untuk beribadah. Perbedaan distribusi ruang pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa media tidak sekadar memilih narasumber, tetapi juga mendistribusikan otoritas simbolik kepada aktor tertentu sehingga memengaruhi persepsi publik mengenai siapa yang memiliki legitimasi untuk berbicara atas nama Islam.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan istilah “Salafi-Wahabi” dalam pemberitaan bukan sekadar kategori teologis, melainkan juga label diskursif yang mengandung konsekuensi ideologis. Dalam perspektif Norman Fairclough, pilihan bahasa selalu berkaitan dengan relasi kuasa karena setiap istilah yang digunakan media membawa konsekuensi terhadap proses legitimasi maupun delegitimasi suatu kelompok.²⁹ Dengan demikian, penyematan label tertentu tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan identitas sosial yang memengaruhi cara masyarakat memandang kelompok keagamaan tertentu.

Analisis ini sejalan dengan konsep *symbolic power* Pierre Bourdieu yang menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui dominasi politik atau ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan mendefinisikan realitas sosial yang kemudian diterima sebagai sesuatu yang wajar (*doxa*).³⁰ Dalam konteks pembangunan Masjid MIAH, media menjadi salah satu arena utama tempat berlangsungnya distribusi kekuasaan simbolik tersebut. Aktor yang memperoleh akses lebih besar dalam pemberitaan secara bersamaan memperoleh peluang lebih besar untuk membentuk opini publik dan memperoleh legitimasi moral dibandingkan aktor yang jarang diberi ruang dalam pemberitaan.

Perspektif ini sekaligus memperlihatkan bahwa konflik pembangunan Masjid MIAH merupakan bentuk kontestasi otoritas Islam publik, bukan sekadar konflik antara kelompok masyarakat. Yang diperebutkan bukan hanya keberadaan bangunan fisik masjid, tetapi juga hak untuk mendefinisikan identitas Islam yang dianggap moderat, sah, dan sesuai dengan kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Dalam pengertian ini, media berfungsi sebagai arena tempat berlangsungnya negosiasi, reproduksi, sekaligus kontestasi makna mengenai otoritas Islam di ruang publik.

Fenomena tersebut memperkuat pandangan Robert W. Hefner bahwa perkembangan Islam Indonesia ditandai oleh proses demokratisasi ruang publik

yang memungkinkan berbagai kelompok Islam berkompetisi secara terbuka dalam memperoleh legitimasi sosial tanpa adanya satu otoritas tunggal yang sepenuhnya dominan.³¹ Oleh karena itu, pemberitaan media lokal mengenai pembangunan Masjid MIAH bukan hanya mencerminkan dinamika lokal di Bogor, tetapi juga merepresentasikan perubahan yang lebih luas dalam konfigurasi otoritas Islam Indonesia di era demokrasi dan masyarakat informasi.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi kontrol sosial media tidak hanya bekerja melalui penyampaian informasi atau pengawasan terhadap kebijakan publik, tetapi juga melalui proses produksi legitimasi keagamaan. Media menentukan aktor mana yang memperoleh ruang bicara, nilai mana yang diposisikan sebagai norma publik, serta identitas keagamaan mana yang memperoleh pengakuan sosial. Dengan demikian, dalam kasus pembangunan Masjid MIAH, media lokal menjalankan fungsi ganda sebagai penyampai informasi sekaligus sebagai arena ideologis yang membentuk konfigurasi otoritas Islam di ruang publik.

Media sebagai Political Actor

Media memiliki peran sentral dalam konflik pembangunan Masjid MIAH karena tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai aktor politik dan ideologis yang mengonstruksi realitas sosial melalui proses seleksi isu, representasi, dan *framing*. Dalam perspektif komunikasi kritis, media bukan sekadar mencerminkan realitas, melainkan secara aktif membentuk cara publik memahami suatu peristiwa melalui pemilihan fakta, narasumber, struktur narasi, dan penggunaan istilah tertentu.³² Proses tersebut menunjukkan bahwa media menjalankan fungsi *social control*, yakni menentukan batas-batas makna yang dianggap sah dalam ruang publik sekaligus membentuk legitimasi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Temuan penelitian-penelitian terbaru mengenai *Critical Discourse Analysis* juga menunjukkan bahwa media berperan dalam mereproduksi dominasi, prasangka, dan relasi kuasa melalui struktur wacananya.³³

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Metropolitan.id dan Hariansinarbogor.com membangun konstruksi yang berbeda terhadap polemik pembangunan Masjid MIAH. Metropolitan.id lebih sering menampilkan narasi yang menghubungkan konflik dengan isu ideologi Salafi–Wahabi serta potensi terganggunya harmoni sosial, sedangkan Hariansinarbogor.com lebih menonjolkan perspektif hak konstitusional masyarakat untuk mendirikan rumah ibadah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *framing* media bukan hanya persoalan teknis jurnalistik, tetapi merupakan praktik ideologis yang menentukan bagaimana konflik dipahami, siapa yang memperoleh legitimasi moral, dan siapa yang diposisikan sebagai pihak yang dipersalahkan.³⁴

Dalam perspektif Teun A. van Dijk, pilihan narasumber, penggunaan istilah, dan struktur teks merupakan bagian dari hubungan antara struktur wacana, kognisi sosial, dan konteks sosial. Oleh karena itu, penggunaan label seperti “Salafi–Wahabi”, “kerukunan masyarakat”, atau “hak beribadah” tidak dapat dipahami sebagai pilihan linguistik yang netral, melainkan sebagai strategi diskursif yang membentuk persepsi pembaca terhadap konflik. Dengan kata lain, media tidak hanya memberitakan pembangunan Masjid MIAH, tetapi sekaligus membangun definisi mengenai kelompok mana yang memperoleh legitimasi sebagai representasi Islam yang dapat diterima di ruang publik. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh berbagai penelitian *Critical Discourse Analysis* yang menyimpulkan bahwa media membangun identitas sosial dan ideologi melalui representasi bahasa serta pola pemberitaan.³⁵

Kasus MIAH memperlihatkan bahwa pembangunan masjid bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga merupakan arena kontestasi otoritas keagamaan di antara kelompok-kelompok Islam. Dalam konteks ini, media berfungsi sebagai ruang produksi makna tempat berlangsungnya perebutan legitimasi keagamaan. Ketika Metropolitan.id lebih banyak mengutip tokoh Ansor, aparat pemerintah, atau pihak yang menolak pembangunan masjid, media tersebut secara tidak langsung memberikan otoritas simbolik kepada kelompok tersebut dalam mendefinisikan konflik. Sebaliknya, Hariansinarbogor.com lebih sering menghadirkan pengurus MIAH dan organisasi pendukung kebebasan beragama sehingga membangun narasi yang berbeda mengenai hak-hak warga negara. Perbedaan akses terhadap ruang pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa media menjalankan fungsi *gatekeeping* sekaligus mendistribusikan legitimasi kepada aktor tertentu, sedangkan kelompok lain berada pada posisi yang lebih marginal.³⁶

Selain membentuk legitimasi, media juga berpotensi menghasilkan moral panic ketika suatu konflik terus-menerus dikaitkan dengan ancaman terhadap stabilitas sosial, radikalisme, atau ekstremisme. Dalam kasus MIAH, penggunaan label ideologis tertentu berpotensi memperluas konflik lokal menjadi persoalan identitas keagamaan yang lebih luas. Akibatnya, opini publik tidak hanya dibentuk oleh fakta empiris, tetapi juga oleh konstruksi diskursif media mengenai siapa yang dianggap moderat, siapa yang dipersepsikan radikal, dan kelompok mana yang memperoleh otoritas moral dalam ruang publik. Berbagai penelitian mengenai *framing* media menunjukkan bahwa proses seperti ini merupakan bagian dari mekanisme produksi makna yang memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu.³⁷

Dengan demikian, media lokal dalam polemik pembangunan Masjid MIAH tidak dapat diposisikan sebagai pengamat yang netral. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedua media menjalankan fungsi kontrol sosial melalui

konstruksi wacana yang berbeda-beda sesuai dengan orientasi ideologis masing-masing. Kontribusi penelitian ini memperluas penerapan Analisis Wacana Kritis Van Dijk dengan menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial media lokal bekerja melalui produksi legitimasi keagamaan, distribusi otoritas simbolik, dan pembentukan identitas sosial dalam konflik intra-Muslim, bukan semata-mata melalui penyampaian informasi.

Polarisasi Intra-Islam dan Konstruksi Identitas Keagamaan dalam Media Lokal

Kasus pembangunan Masjid MIAH menunjukkan bahwa konflik yang berkembang di ruang publik tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik rumah ibadah ataupun persoalan administratif perizinan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberitaan *Metropolitan.id* maupun *Hariansinarbogor.com* mengonstruksi konflik sebagai bagian dari dinamika hubungan antar kelompok Muslim yang memiliki orientasi ideologis berbeda. Dengan demikian, konflik ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk polarisasi intra-Islam, yakni proses pembentukan batas-batas identitas keagamaan melalui praktik diskursif media, daripada sekadar konflik pembangunan masjid. Polarisasi tersebut menunjukkan bahwa media bukan hanya merepresentasikan realitas, tetapi turut mengonstruksi makna sosial mengenai siapa yang dianggap mewakili Islam yang sah di ruang publik.³⁸

Dalam perspektif Stuart Hall, identitas sosial tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk melalui proses representasi yang berlangsung melalui bahasa, simbol, dan praktik budaya. Representasi bukanlah refleksi objektif atas realitas, melainkan proses produksi makna yang selalu dipengaruhi oleh relasi kuasa dan kepentingan ideologis. Oleh karena itu, kategori seperti “Salafi-Wahabi”, “Islam moderat”, “Ahlussunnah wal Jama’ah”, maupun “Islam rahmatan lil-’alamin” bukan hanya istilah teologis, tetapi juga identitas diskursif yang diproduksi media untuk membedakan kelompok sosial tertentu.³⁹

Dalam pemberitaan *Metropolitan.id*, penggunaan istilah Salafi-Wahabi lebih sering dikaitkan dengan potensi disharmoni sosial, ancaman terhadap kerukunan masyarakat, dan kekhawatiran terhadap berkembangnya paham keagamaan tertentu. Sebaliknya, *Hariansinarbogor.com* lebih banyak menghindari pelabelan ideologis dan membingkai konflik dalam perspektif hak konstitusional warga negara, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap putusan pengadilan. Perbedaan strategi representasi tersebut menunjukkan bahwa kedua media membangun identitas keagamaan yang berbeda melalui pemilihan narasumber, struktur narasi, serta penggunaan istilah tertentu. Dengan demikian, media tidak hanya melaporkan konflik, tetapi juga menentukan bagaimana publik memahami aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.⁴⁰

Analisis tersebut sejalan dengan konsep representasi aktor sosial dari Theo van Leeuwen, yang menjelaskan bahwa media selalu melakukan proses *inclusion* dan *exclusion*, yakni menentukan siapa yang diberi ruang berbicara, siapa yang diposisikan sebagai sumber legitimasi, dan siapa yang dimarginalkan dalam suatu wacana. Pilihan tersebut bukan keputusan teknis jurnalistik semata, melainkan bagian dari praktik ideologis yang memengaruhi persepsi publik terhadap suatu kelompok sosial. Oleh karena itu, penggunaan label “Salafi-Wahabi” dalam pemberitaan tidak hanya berfungsi sebagai kategori deskriptif, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi maupun delegitimasi identitas keagamaan tertentu.⁴¹

Dalam kerangka *Critical Discourse Analysis*, Norman Fairclough menegaskan bahwa setiap praktik diskursif selalu berkaitan dengan relasi kuasa karena bahasa merupakan instrumen yang digunakan untuk memproduksi dan mereproduksi ideologi.⁴² Hal tersebut tampak dalam kasus MIAH ketika pilihan istilah, sumber berita, dan pola argumentasi yang digunakan masing-masing media membentuk persepsi berbeda mengenai siapa yang dianggap sebagai penjaga kerukunan, siapa yang diposisikan sebagai korban, dan siapa yang dipersepsikan sebagai penyebab konflik. Dengan demikian, objektivitas media tidak dapat dipahami sebagai posisi yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai hasil konstruksi diskursif yang dipengaruhi oleh orientasi ideologis media itu sendiri.⁴³

Fenomena tersebut juga memperlihatkan bagaimana media berpartisipasi dalam proses reproduksi *symbolic power*. Menurut Pierre Bourdieu, kekuasaan simbolik bekerja melalui kemampuan mendefinisikan realitas sosial sehingga diterima sebagai sesuatu yang wajar (*doxa*). Dalam konteks pembangunan Masjid MIAH, media menjadi arena distribusi kekuasaan simbolik karena aktor yang memperoleh ruang pemberitaan lebih besar secara bersamaan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat dibandingkan kelompok yang kurang memperoleh akses media.⁴⁴ Dengan kata lain, pemberitaan media tidak hanya mendistribusikan informasi, tetapi juga mendistribusikan otoritas keagamaan di ruang publik.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa polarisasi intra-Islam dalam kasus MIAH tidak sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan doktrin keagamaan. Konflik berkembang melalui interaksi antara identitas keagamaan, kepentingan sosial-politik lokal, serta konstruksi media yang terus mereproduksi narasi mengenai moderasi, toleransi, maupun ancaman ideologis. Dalam konteks ini, media tidak menciptakan konflik dari ruang hampa, tetapi memperkuat, menegosiasikan, atau mereduksi kompleksitas konflik melalui strategi representasi yang digunakannya.

Temuan ini sejalan dengan kajian Ahmad Najib Burhani mengenai kontestasi otoritas Islam di Indonesia yang menunjukkan bahwa otoritas keagamaan kontemporer tidak lagi dimonopoli oleh lembaga keagamaan tradisional, melainkan

diproduksi melalui ruang publik, termasuk media massa dan media digital. Demikian pula Noorhaidi Hasan menjelaskan bahwa perkembangan media digital telah memperluas arena perebutan otoritas keagamaan sehingga legitimasi Islam semakin dibentuk melalui produksi wacana di ruang publik, bukan semata-mata melalui institusi keagamaan formal.⁴⁵

Dengan demikian, polarisasi intra-Islam dalam kasus pembangunan Masjid MIAH tidak dapat dipahami sebagai pertentangan teologis semata, tetapi sebagai hasil interaksi antara produksi wacana media, perebutan legitimasi keagamaan, dan dinamika politik identitas di ruang publik. Analisis ini memperlihatkan bahwa media lokal berfungsi bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai arena ideologis tempat identitas keagamaan diproduksi, dinegosiasikan, dan diperebutkan. Temuan tersebut sekaligus memperkuat argumentasi bahwa fungsi kontrol sosial media bekerja melalui proses konstruksi legitimasi keagamaan dan pembentukan makna sosial, bukan sekadar melalui penyebaran informasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa polemik pembangunan Masjid MIAH tidak hanya diberitakan sebagai konflik lokal mengenai pendirian rumah ibadah, tetapi juga dikonstruksi secara diskursif oleh media lokal sebagai arena kontestasi legitimasi keagamaan dan otoritas Islam di ruang publik. Melalui Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, penelitian ini menemukan bahwa *Metropolitan.id* dan *Hariansinarbogor.com* membangun konstruksi wacana yang berbeda sehingga fungsi kontrol sosial media berjalan melalui orientasi ideologis yang tidak sama.

Metropolitan.id lebih dominan membingkai polemik pembangunan MIAH melalui narasi harmoni sosial, ketertiban masyarakat, dan kekhawatiran terhadap berkembangnya ideologi Salafi-Wahabi, sehingga konflik diposisikan sebagai persoalan menjaga kohesi sosial dan stabilitas kehidupan keagamaan. Sebaliknya, *Hariansinarbogor.com* secara konsisten membangun wacana berdasarkan perspektif hak konstitusional, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum, dengan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan tempat ibadah tanpa dipengaruhi oleh perbedaan pandangan keagamaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa media lokal tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi secara aktif membangun legitimasi keagamaan melalui pemilihan narasumber, penggunaan istilah, serta penekanan aspek tertentu dalam pemberitaan.

Meskipun hasil wawancara dengan redaksi kedua media menunjukkan bahwa mereka berupaya menjaga prinsip keberimbangan dan menolak adanya intervensi eksternal dalam proses pemberitaan, analisis penelitian ini memperlihatkan bahwa objektivitas media tidak pernah sepenuhnya bebas dari konstruksi ideologis. Sebagaimana dijelaskan dalam Analisis Wacana Kritis, ketiadaan intervensi yang

tampak tidak serta-merta menunjukkan netralitas media, karena orientasi ideologis tetap hadir melalui praktik representasi yang menentukan aktor mana yang memperoleh legitimasi, suara mana yang lebih dominan, dan identitas keagamaan seperti apa yang dikonstruksi sebagai representasi Islam di ruang publik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media lokal berfungsi tidak hanya sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai produsen legitimasi keagamaan dan kekuasaan simbolik. Pelabelan terhadap kelompok keagamaan, distribusi ruang pemberitaan kepada aktor tertentu, serta konstruksi narasi yang berbeda turut membentuk kontestasi otoritas Islam di Indonesia. Dengan demikian, polemik pembangunan Masjid MIAH tidak semata-mata merupakan konflik administratif mengenai pembangunan masjid, tetapi juga merepresentasikan proses negosiasi identitas keagamaan, legitimasi publik, dan relasi intra-Muslim dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian media dan agama dengan mengintegrasikan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk dengan konsep kontrol sosial dalam komunikasi massa. Penelitian ini menunjukkan bahwa media lokal merupakan arena ideologis tempat legitimasi keagamaan, kekuasaan simbolik, dan identitas sosial diproduksi serta diperebutkan melalui praktik-praktik diskursif. Temuan ini memperkaya kajian mengenai hubungan media, agama, dan ruang publik di Indonesia, sekaligus memberikan perspektif baru tentang peran media lokal dalam membentuk pluralisme keagamaan dan dinamika hubungan intra-Muslim dalam masyarakat demokratis.

Catatan Kaki

1. Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure: Toward the Codification of Theory and Research* (Columbia University: The Free Press, 1968), 56-57.
2. Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory* - 6th ed. (USA: SAGE Publications, 2010), 98. <http://docshare04.docshare.tips/files/28943/289430369.pdf>.
3. Pamela J. Shoemaker & Stephen D. Reese. *Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective*. (New York and London: Routledge - Routledge, 2014). <https://doi.org/10.4324/9780203930434>
4. Daniel C. Halim & Paolo Mancini, *Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790867>
5. Happer, Catherine, and Greg Philo. "The role of the media in the construction of public belief and social change." *Journal of social and political psychology* 1, no. 1 (2013): 321-336. <https://doi.org/10.5964/jssp.v1i1.96>
6. Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang dengan judul "Tolak Keras Pembangunan MIAH dan Keberadaan Wahabi di Kota Bogor, LBH Ansor: Pemkot Jangan Kabur Dari Masalah". Baca selengkapnya di: <https://www.metropolitan.id/bogor-raya/95313474826/tolak-keras-pembangunan-miah-dan-keberadaan-wahabi-di-kota-bogor-lbh-ansor-pemkot-jangan-kabur-dari-masalah>
7. Kementerian Agama RI. 2024, Maret 7. Data masjid di Indonesia. Sistem Informasi Masjid (SIMAS). <https://simas.kemenag.go.id/>
8. Ibnu Majah. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Maktabah Syamilah. Tt.
9. Sekretariat Jenderal MPR RI. 2002. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sekretariat Jenderal MPR RI.
10. Admin, "Soal Pembangunan Masjid, GMPRI Minta Hak Beribadah Ditempat Ibadah Terpenuhi", lihat <https://www.hariansinarbogor.com/2024/09/13/soal-pembangunan-masjid-gmpri-minta-hak-beribadah-ditempat-ibadah-terpenuhi/?srsltid=AfmBOooExxTr--5J-URUuY8-8MoABHsjj1oLL1yHqY3JKvD9E2NWggG>
11. Jalaluddin Rakhmad, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2007).
12. Teun A. van Dijk. "Principles of critical discourse analysis." *Discourse & society* 4, no. 2 (1993): 249-283. <https://doi.org/10.1177/0957926593004002006>
13. Jorgensen, Marianne W., and Louise Phillips. "Discourse analysis as theory and method." (2002): 1-230.
14. Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (London: Routledge, 2010). <https://doi.org/10.4324/9781315834368>
15. Afandi, Yusuf Afandi. "Serupa Tapi Tidak Bersama: Pemberitaan Media Dalam Konflik Pendirian Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal Di Kota Bogor". *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah* 14, no. 2 (December 31, 2024): 256-277. Accessed June 30, 2026. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/komunida/article/view/11008>.
16. Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 102.
17. John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 203.
18. Kvale Steinar Kvale & Svend Brinkmann, *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research interviewing - Second Edition*. (SAGE Publication, Inc., 2008), 89.
19. Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang dengan judul "Tolak Keras Pembangunan MIAH dan Keberadaan Wahabi di Kota Bogor, LBH Ansor: Pemkot

- Jangan Kabur Dari Masalah". Baca selengkapnya di: <https://www.metropolitan.id/bogor-raya/95313474826/tolak-keras-pembangunan-miah-dan-keberadaan-wahabi-di-kota-bogor-lbh-ansor-pemkot-jangan-kabur-dari-masalah>
20. Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang dengan judul "Balada Konflik MIAH yang Tak Kunjung Usai". Baca selengkapnya di: <https://www.metropolitan.id/metro-bogor/9537889530/balada-konflik-miah-yang-tak-kunjung-usai>
 21. Hariansinarbogor.com. 2024, September 12. Aktivis Bogor soroti surat Ketua MUI soal MIAH. Hariansinarbogor.com. <https://hariansinarbogor.com/>
 22. Admin, "Soal Pembangunan Masjid, GMPRI Minta Hak Beribadah Ditempat Ibadah Terpenuhi", lihat <https://www.hariansinarbogor.com/2024/09/13/soal-pembangunan-masjid-gmpri-minta-hak-beribadah-ditempat-ibadah-terpenuhi/?srsId=AfmBOooExxTr--5J-URUuY8-8MoABHjsJj1oLL1yHqY3JKvD9E2NWggG>
 23. Teun A. van Dijk. *Discourse and Power* (Palgrave Macmillan: Macmillan Education UK, 2008), 36.
 24. Stuart Hall. "The Problem of Ideology-Marxism without Guarantees". *Journal of Communication Inquiry* Volume 10, Issue 2 (First published June 1986), <https://doi.org/10.1177/019685998601000203>
 25. Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge: Polity Press, 1991).
 26. Norman Fairclough, *Media Discourse*, New York: Great Britain -Edward Arnold, 1995.
 27. Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory* - 6th ed. (USA: SAGE Publications, 2010), <http://docshare04.docshare.tips/files/28943/289430369.pdf>.
 28. Dale F. Eickelman, and Armando Salvatore. "Public Islam and the common good." *Etnográfica. Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia* 10.1) (2006): 97-105.
 29. Norman Fairclough, "Critical discourse analysis." *The Routledge handbook of discourse analysis*. Routledge, 2023. 11-22.
 30. Pierre Bourdieu, *Language and symbolic power*. Harvard University press, 1991.
 31. Robert W. Hefner, "Print Islam: mass media and ideological rivalries among Indonesian Muslims." *Indonesia* 64 (1997): 77-103; Hefner, Robert W. "The social scientific study of Islam in Indonesia: A 75 year retrospective." *Studia Islamika* 32.1 (2025): 9-42.
 32. Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory* - 6th ed. (USA: SAGE Publications, 2010), <http://docshare04.docshare.tips/files/28943/289430369.pdf>.
 33. Emi Sahmeni, dan Nur Afifah. "Using critical discourse analysis (CDA) in media discourse studies: unmask the mass media." *REiLA: Journal of Research and Innovation in Language* 1.2 (2019): 39-45.
 34. Stuart Hall. "The Problem of Ideology-Marxism without Guarantees". *Journal of Communication Inquiry* Volume 10, Issue 2 (First published June 1986), <https://doi.org/10.1177/019685998601000203>
 35. Wardoyo Dingkol, "Konstruksi Kritik Tokoh Publik dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Terhadap Berita Mens Rea Pandji Pragiwaksono di Kompas.com." *Academic Journal of Da'wa and Communication* 6.2 (2025): 137-156.
 36. Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language - 2nd Edition* (London: Routledge, 2010), <https://doi.org/10.4324/9781315834368>
 37. Nikita Maharani, dan Muhammadong Muhammadong. "Analyzing Religious Conflicts On Social Media Based on The First Principle of Pancasila." *Journal of Digital Law and Policy* 3.2 (2024): 88-98.

38. Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory* - 6th ed. (USA: SAGE Publications, 2010), <http://docshare04.docshare.tips/files/28943/289430369.pdf>.
39. Stuart Hall, Jessica Evans, and Sean Nixon. "Representation: cultural representations and signifying practices." (2024): 1-100; Annisa Berliana Difa dan Al Gusma Setyawan. "Representasi Dalam Media dan Budaya: Perspektif Teori Stuart Hall." *Studi Agama* 2 (2024): 83-90.
40. Emi Sahmeni, dan Nur Afifah. "Using critical discourse analysis (CDA) in media discourse studies: unmask the mass media." *REiLA: Journal of Research and Innovation in Language* 1.2 (2019): 39-45
41. Theo Van Leeuwen, "The representation of social actors." *Texts and practices*. Routledge, 2013. 32-70.
42. Norman Fairclough, *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge, 2013.
43. Veni Nurpadillah, et al. "Power and Identity Representation in News on Indonesia's Capital Relocation: A Fairclough Critical Discourse Analysis." *SAWERIGADING* 31.2 (2025): 365-382.
44. Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge: Polity Press, 1991).
45. Burhani, Ahmad Najib, and Plural Islam. "Contestation of Religious Authority in Indonesia." *Islam in Southeast Asia: Negotiating Modernity* (2018): 140.

Daftar Pustaka

Admin, "Soal Pembangunan Masjid, GMPRI Minta Hak Beribadah Ditempat Ibadah Terpenuhi", <https://www.hariansinarbogor.com/2024/09/13/soal-pembangunan-masjid-gmpri-minta-hak-beribadah-ditempat-ibadah-terpenuhi/?srsltid=AfmBOooExxTr--5J-URUuY8-8MoABHjsJj1olL1yHqY3JKvD9E2NWggG>

Afandi, Yusuf Afandi. "Serupa Tapi Tidak Bersama: Pemberitaan Media Dalam Konflik Pendirian Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal Di Kota Bogor". *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah* 14, no. 2 (December 31, 2024): 256–277. Accessed June 30, 2026. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/komunida/article/view/11008>.

Afriansyah, Anggi. "Konstruksi, Kontestasi, Fragmentasi, Dan Pluralisasi Otoritas Keagamaan Indonesia Kontemporer". *Studia Islamika* 28, no. 1 (April 28, 2021): 227–244. Accessed June 30, 2026. <https://studiaislamika.ppimcensis.or.id/index.php/studia-islamika/article/view/20514>.

Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*, Cambridge: Polity Press, 1991.

Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language - 2nd Edition*. London: Routledge, 2010, <https://doi.org/10.4324/9781315834368>

Fairclough, Norman. *Media Discourse*, New York: Great Britain -Edward Arnold, 1995.

Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers, 1971.

Hakim, Lukman, and Zainal Mukhlis. "Otoritas Agama Di Ruang Siber: Fragmentasi Dan Kontestasi:". *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (October 1, 2023): 119–132. Accessed June 30, 2026. <https://jurnalfdk.uinsa.ac.id/index.php/JIK/article/view/1574>.

Halim, Daniel C. & Mancini, Paolo. *Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790867>

Hall, Stuart. "The Problem of Ideology-Marxism without Guarantees". *Journal of Communication Inquiry* Volume 10, Issue 2 (First published June 1986), <https://doi.org/10.1177/019685998601000203>

Hallin, Daniel C., and Paolo Mancini. *Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. of Communication, Society and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Happer, Catherine, and Greg Philo. "The role of the media in the construction of public belief and social change." *Journal of social and political psychology* 1, no. 1 (2013): 321-336. <https://doi.org/10.5964/jspp.v1i1.96>

Hasan, Noorhaidi. *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Imam, Muhammad. "Balada Konflik MIAH yang Tak Kunjung Usai". Baca selengkapnya di: <https://www.metropolitan.id/metro-bogor/9537889530/balada-konflik-miah-yang-tak-kunjung-usai>

- Jorgensen, Marianne W., and Louise Phillips. "Discourse analysis as theory and method." (2002): 1-230.
- Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research interviewing - Second Edition*. SAGE Publication, Inc., 2008, 89.
- Majah, Ibnu. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Maktabah Syamilah. Tt.
- McQuail, Denis. *McQuail's Mass Communication Theory* - 6th ed. (USA: SAGE Publications, 2010), <http://docshare04.docshare.tips/files/28943/289430369.pdf>.
- Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure: Toward the Codification of Theory and Research*. Columbia University: The Free Press, 1968, 56-57.
- Muttaqien, Ryan. "Tolak Keras Pembangunan MIAH dan Keberadaan Wahabi di Kota Bogor, LBH Ansor: Pemkot Jangan Kabur Dari Masalah". Baca selengkapnya di: <https://www.metropolitan.id/bogor-raja/95313474826/tolak-keras-pembangunan-miah-dan-keberadaan-wahabi-di-kota-bogor-lbh-ansor-pemkot-jangan-kabur-dari-masalah>
- Pedersen, Johannes. *The Arabic Book*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984.
- Rakhmad, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Saparudin, Saparudin. "Desakralisasi Otoritas Keagamaan Tuan Guru Purifikasi Salafi Versus Tradisionalisme Nahdlatul Wathan". *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 20, no. 1 (July 30, 2022): 25–44. Accessed June 30, 2026. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/6384>.
- Saputra, Eko and Fadhli. "Media Baru, Fragmentasi Dan Kontestasi Otoritas Keagamaan Di Aceh: Dari Ulama Lokal Ke Ustaz". *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 2 (December 31, 2020): 429–462. Accessed June 30, 2026. <https://jlka.kemenag.go.id/lektur/article/view/806>.
- Shoemaker, Pamela J. & Reese, Stephen D. *Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective*. (New York and London: Routledge - Routledge, 2014). <https://doi.org/10.4324/9780203930434>
- van Dijk, Teun A. "Principles of critical discourse analysis." *Discourse & society* 4, no. 2 (1993): 249-283. <https://doi.org/10.1177/0957926593004002006>

van Dijk, Teun A. *Discourse and Power*, Palgrave Macmillan: Macmillan Education UK, 2008, 36.

Suhaimi, Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Email: suhaimi@uinjkt.ac.id

Fauzan Kaifah, Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Email: fauzankaifah@gmail.com

Cinta Rahmi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha; Email: cinta@stieganessa.ac.id